

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGAMBILAN SPESIMEN UNTUK TES DNA TANPA IZIN PEMILIK SAMPEL

Darto (2310622037), Pembimbing 1 (Abdul Kolib), Pembimbing 2 (Handoyo Prasetyo)

Di Indonesia, penggunaan tes DNA sering kali menjadi salah satu bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk membuktikan atau menyangkal keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa hukum. Namun demikian, pengaturan mengenai tes DNA belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam undang-undang, khususnya terkait dengan legalitas pengambilan spesimen untuk tes DNA tanpa izin pemilik sampel. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang mengatur perlindungan data pribadi, namun tidak secara spesifik menyinggung perihal tes DNA dan legalitas pengambilan spesimen yang diambil tanpa izin pemilik sampel, sehingga masih menjadi area abu-abu yang memerlukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengambilan spesimen DNA yang dilakukan tanpa persetujuan/izin pemilik sampel, serta implikasinya terhadap sistem pembuktian hukum di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pengambilan spesimen atau sampel tanpa izin menimbulkan persoalan serius terkait hak privasi dan perlindungan hukum individu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setiap alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah. Pengambilan spesimen/sampel tanpa izin dapat melanggar hak privasi yang dijamin oleh hukum, dan berpotensi membuat hasil tes DNA tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran etika medis dan hukum privasi dalam menentukan validitas hasil tes DNA dalam proses peradilan, serta memberikan rekomendasi untuk regulasi yang lebih jelas terkait prosedur pengambilan sampel DNA.

Kata kunci: Legalitas, Tes DNA, Hak Privasi, Pembuktian Hukum, Persetujuan

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF SPECIMEN COLLECTION FOR DNA TESTING WITHOUT THE PERMISSION OF THE SAMPLE OWNER

Darto (2310622037), Advisor 1 (Abdul Kolib), Advisor 2 (Handoyo Prasetyo)

In Indonesia, DNA testing is often used as one of the scientific means of evidence to prove or refute an individual's involvement in a legal event. However, the regulation concerning DNA testing has not yet been comprehensively governed by statutory law, particularly with regard to the legality of collecting specimens for DNA testing without the consent of the sample owner. Law Number 36 of 2009 on Health, as amended by Law Number 17 of 2023, and Law Number 23 of 2006 on Civil Registration, as amended by Law Number 24 of 2013, indeed provide provisions on the protection of personal data. Nonetheless, they do not specifically address the issue of DNA testing and the legality of specimen collection conducted without the consent of the individual concerned, rendering this issue a legal grey area that requires further examination. This study aims to analyze the legality of collecting DNA specimens without the consent or permission of the sample owner, as well as its implications for the evidentiary system in Indonesia. This thesis adopts a normative juridical research method with a statutory and regulatory approach. The findings of the study indicate that collecting specimens without the subject's consent raises serious concerns regarding the right to privacy and the legal protection of individuals. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP), every piece of evidence must be obtained through lawful means. The unauthorized collection of DNA specimens may constitute a violation of the right to privacy as guaranteed by law, and may render the resulting DNA evidence inadmissible in court. This study further explores the role of medical ethics and privacy law in determining the legal validity of DNA evidence in judicial proceedings, and provides recommendations for the formulation of clearer and more specific regulations regarding the procedures for collecting DNA specimens.

Keywords: *Legality, DNA Testing, Privacy Rights, Legal Proof, Consent*